

## **Pendahuluan**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang berperan krusial dalam dunia ekonomi negara Indonesia. Selain berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan pekerjaan, UMKM juga mampu menciptakan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan secara lebih merata. Sebagaimana fenomena yang ada terlihat bahwa keberadaan UMKM cukup potensial dalam pengembangan perekonomian. Terutama pada Kabupaten Pekalongan sendiri UMKM Kuliner menjadi ajang promosi kuliner daerah (Admin, 2020). Meskipun demikian, pengelolaan keuangan yang efektif masih menjadi tantangan utama bagi banyak pelaku UMKM. Salah satu dari aspek yang penting dalam hal pengelolaan keuangan yaitu melakukan penyusunan laporan keuangan yang berpedoman dan agar tidak berbeda dengan standar akuntansi yang berlaku. Penyesuaian laporan keuangan dengan mengimplementasikan SAK EMKM pada dasarnya harus menjadi pegangan bagi UMKM saat menyusun laporan keuangan (Rayyani et al., 2020).

Dalam upaya untuk menyederhanakan proses penyusunan laporan keuangan bagi UMKM, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Standar tersebut dirancang untuk mempermudah UMKM saat menyusun laporan keuangan dengan format lebih sederhana dibandingkan dengan bentuk SAK yang diberlakukan untuk perusahaan besar. Meskipun SAK EMKM telah diterbitkan sejak tahun 2018, penerapannya di lapangan, khususnya di Kabupaten Pekalongan, masih menunjukkan sejumlah kendala. Kendala yang terbentuk didalam penerapan SAK EMKM oleh UMKM umumnya berupa kurangnya kemampuan UMKM dalam memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan individual pribadi pemilik serta rendahnya pendidikan dan pengetahuan akuntansi pelaku UMKM (Irfansyah, 2023).

Dengan demikian, meskipun terdapat standar akuntansi untuk pencatatan khusus pada keuangan UMKM. Namun, hal tersebut belum diiringi dengan kesadaran para pelaku UMKM. Dimana mereka masih banyak yang menghiraukan pembukuan dikarenakan buta akan akuntansi. Sebagaimana informasi yang dikutip dari website resmi Kompasiana (2020) yang menyebutkan bahwa kesadaran akan pentingnya pembukuan laporan keuangan dikalangan UMKM masih minim. Beberapa diantaranya memiliki permasalahan pada pengetahuan ilmu keuangan.

Dalam studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui observasi langsung, ditemukan kasus yang menunjukkan bahwa masih banyak UMKM di bidang kuliner di Kabupaten Pekalongan yang belum memahami secara menyeluruh dan masih minim pengetahuan akan pentingnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Sebagian besar UMKM bidang kuliner di wilayah ini masih mengandalkan pencatatan keuangan yang sederhana dan tidak terstruktur, yang seringkali hanya berfungsi untuk keperluan internal dan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kurangnya pemahaman ini berdampak signifikan pada kemampuan UMKM bidang kuliner dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses pembiayaan, menarik investasi, dan mempertahankan keberlanjutan usaha.

Minimnya kesadaran pelaku UMKM berbanding terbalik dengan kuatnya peningkatan jumlah UMKM, seperti pada salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data empiris yang dipublikasikan oleh website resmi radio kota batik pekalongan (2023), Kabupaten Pekalongan menunjukkan pertumbuhan UMKM yang pesat. Menurut Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, jumlah UMKM terus bertambah. Hal ini diinformasikan berdasarkan data *Online Single Submission* (OSS), dimana data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Pekalongan terdapat 67.410 UMKM, baik jasa maupun

industri, dengan mayoritas di bidang kuliner. Angka ini meningkat signifikan dari 58.000 UMKM pada tahun sebelumnya, memperlihatkan pertumbuhan pesat UMKM di Kabupaten Pekalongan. Dimana didominasi oleh UMKM bidang kuliner dengan total sekitar 2.562 dengan rincian UMKM bidang kuliner mikro sejumlah 2.095, UMKM bidang kuliner kecil sejumlah 455, dan UMKM bidang kuliner menengah sejumlah 12 (Open Data Kabupaten Pekalongan, 2023). Namun dengan pesatnya pertumbuhan jumlah UMKM tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah masih mengusahakan agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) untuk mendapatkan salah satu fasilitas pelatihan peningkatan SDM dan keuangan, sebagai akibat dari masih minimnya pengetahuan ilmu keuangan pada SDM pelaku UMKM.

Adanya permasalahan yang demikian tentunya dapat menjadi salah satu ancaman bagi berlangsungnya operasional usaha UMKM. Terutama pada UMKM bidang kuliner yang seringkali menghadapi tantangan dalam manajemen keuangan dan operasional sehari-hari (Riyanti et al., 2022). Dimana banyak usaha kuliner sangat bergantung pada penjualan harian untuk menjaga arus kas tetap positif. Kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mencatat arus kas dengan baik, mengatur biaya, dan merencanakan keuangan jangka panjang. Hal ini berdampak pada kemampuan UMKM kuliner untuk berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, intervensi dan dukungan dari PLUT menjadi sangat penting agar pelaku UMKM bidang kuliner dapat meningkatkan keterampilan manajemen keuangan mereka, sehingga mampu menjalankan usaha secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Padahal jika dilihat dari informasi yang dikutip dari Kompas.id (2021) mengenai bagaimana UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam roda ekonomi nasional. Menurut (Khasanah, 2023) UMKM berperan dan berpotensi dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Terlebih dalam persaingan yang ketat, UMKM kuliner diindikasikan menghadapi tantangan global. Seharusnya keberlangsungan lini usaha ini perlu terus didukung dengan berbagai stimulus-stimulus yang efektif sebagaimana penerapan SAK EMKM dalam pencatatan laporan keuangan mereka. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Penerapan SAK EMKM adalah salah satu langkah penting dalam proses ini. Selain itu upaya yang terkoordinasi antara berbagai pihak dapat memastikan keberhasilan implementasinya.

Pada penelitian terdahulu oleh Afriansyah et al. (2021) mengungkapkan bahwa implementasi penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dapat menunjang usaha yang dijalankan UMKM bidang kuliner. Namun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM ketika melakukan pencatatan laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAK EMKM. Penelitian oleh Anggraeni et al. (2021) mengungkapkan bahwa pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh UMKM dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi kegiatan operasional usaha serta memudahkan kepada pelaku UMKM untuk mengetahui kondisi usahanya. Apabila UMKM hanya melakukan pencatatan secara sederhana dengan mencatat uang keluar dan uang masuk setiap harinya atau dengan kata lain tidak mencatat laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM maka informasi tersebut akan terbatas mampu dipahami oleh pemilik UMKM saja (Santoro, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Utari et al. (2022) menyebutkan bahwa penerapan SAK EMKM memiliki beberapa kendala yang berupa waktu, tenaga, dan pengetahuan yang tidak mumpuni akan standar tersebut, serta masih dianggap asing oleh pelaku UMKM. Atas poin tersebut, menciptakan pemikiran yang kurang menganggap penting laporan keuangan. Disamping itu pula mereka menganggap pelaporan keuangan yang baik hanya ditujukan untuk perusahaan dengan modal yang besar saja. Adapun menurut Siregar (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan

pelaporan keuangan yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam SAK EMKM disebabkan oleh kurangnya pemahaman atas pencatatan laporan keuangan sesuai standar tersebut.

Dalam penelitian Nikmah et al. (2023) menemukan sebuah informasi jika tidak jarang pelaku UMKM memiliki anggapan yang kurang baik terkait laporan keuangan. Seringnya mereka sudah menganggap bahwa pelaporan keuangan adalah sebuah hal yang sulit dilakukan karena isinya yang kompleks dan cenderung komponen didalamnya dianggap rumit oleh kebanyakan para pelaku UMKM. Selama ini, para pengusaha UMKM hanya menyusun laporan keuangan dengan sangat sederhana dan tidak sesuai dengan standar SAK EMKM. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sumber daya manusia akibat kurangnya pengetahuan dan pendidikan, kekurangan modal, lemahnya jaringan dan kemampuan penetrasi usaha kecil, kurangnya sarana dan prasarana, serta iklim usaha yang tidak mendukung. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Kambey et al. (2023) menunjukkan bahwa pemilik bisnis besar memahami pentingnya menyusun laporan keuangan untuk perusahaan mereka karena berkaitan dengan pengambilan keputusan dan strategi untuk mencapai tujuan serta menjaga kelangsungan operasional bisnis secara efisien. Inilah yang diharapkan dari pelaku UMKM agar mereka mengerti bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan adalah agar pelaku UMKM dapat mengetahui kondisi keuangan usaha mereka. Proses optimalisasi penyusunan laporan keuangan mengalami berbagai kendala, seperti pemilik usaha dan karyawan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga pemberian penjelasan mengenai laporan keuangan mengalami kesulitan.

Jika merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Terlebih penelitian oleh Meliza et al. (2023) yang mengkaji bagaimana literasi keuangan dapat mengoptimalkan pengelolaan UMKM, maka dapat dikatakan bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu berfokus pada optimalisasi penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana faktor-faktor lain selain literasi keuangan yang dapat menunjang optimalisasi pengelolaan keuangan. Meskipun sejumlah studi sebelumnya telah membahas implementasi SAK EMKM, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diatasi. Penelitian sebelumnya seringkali tidak secara mendalam mengeksplorasi faktor-faktor lokal yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM, seperti pengetahuan pelaku UMKM, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan.

Kekurangan-kekurangan ini menimbulkan kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut yang lebih spesifik dan terfokus pada kondisi di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini akan mengevaluasi faktor-faktor yang menghambat penerapan SAK EMKM serta mengidentifikasi strategi-strategi untuk mengatasi kendala tersebut pada operasional UMKM bidang kuliner. Berdasarkan penelitian Utami et al. (2021) diketahui bahwa pendidikan yang ditempuh oleh pemilik dan motivasi tidak memiliki pengaruh terhadap implementasi SAK EMKM, persepsi pemilik berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM. Sementara dalam penelitian Isroiyyah(2023) mengungkapkan bahwa tingkat pengetahuan akuntansi dan kesiapan pelaku UMKM memiliki peran terhadap penerapan SAK EMKM di Kota Pekalongan.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi memberi informasi pengetahuan yang lebih dalam mengenai bagaimana penerapan SAK EMKM dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yang dibuat UMKM di Kabupaten Pekalongan khususnya UMKM bidang kuliner.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama berupa (i) bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM bidang

kuliner di Kabupaten Pekalongan tentang SAK EMKM, (ii) faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan SAK EMKM oleh pelaku UMKM bidang kuliner di Kabupaten Pekalongan, dan (iii) strategi apa yang tepat untuk mengoptimalkan penerapan SAK EMKM di Kabupaten Pekalongan. Rumusan masalah yang menjadi titik problematika dalam hemat penulis, berlandaskan pada pra observasi yang dilakukan penulis ke objek penelitian secara berkala dan wawancara dasar sebagai acuan menggali informasi dari para pelaku UMKM kuliner di wilayah kabupaten Pekalongan.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan memahami tingkat pemahaman pelaku UMKM bidang kuliner tentang SAK EMKM, menganalisis faktor-faktor penghambat, dan merumuskan strategi optimalisasi penerapan SAK EMKM oleh UMKM di Kabupaten Pekalongan. Adapun manfaat yang diharapkan mampu diterima oleh berbagai pihak. Bagi pelaku UMKM bidang kuliner, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang SAK EMKM sehingga dapat membantu mereka dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang lebih baik. Bagi pemangku kepentingan, seperti pemerintah, dinas terkait, dan lembaga keuangan, penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan dan program untuk meningkatkan penerapan SAK EMKM pada UMKM. Sementara itu, bagi akademisi, penelitian ini dapat berkontribusi meningkatkan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi UMKM. Dengan demikian, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pandangan yang mendalam mengenai bagaimana penerapan SAK EMKM dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kualitas dari laporan keuangan UMKM di Kabupaten Pekalongan.

## **Kajian Pustaka**

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Hanim & Noorman (2018) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada unit bisnis yang memiliki sifat mandiri, dijalankan secara individu atau oleh badan usaha, dan mencakup seluruh cakupan sektor-sektor ekonomi. UMKM berfungsi sebagai pilar utama dalam struktur ekonomi, memainkan peran vital dalam berbagai industri dan sektor, termasuk pertanian, perdagangan, manufaktur, dan jasa. Unit usaha ini ditandai oleh skala operasional yang berbentuk lebih kecil, namun unit usaha ini memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan pasar.

UMKM merupakan salah satu landasan penting dunia ekonomi di hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. UMKM berperan penting dalam membentuk lapangan-lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut UURI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha dengan aset maksimal Rp50 juta dan omset maksimal Rp300 juta per tahun. Usaha kecil memiliki aset antara Rp50 juta hingga Rp500 juta dan omset antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun. Sedangkan usaha menengah memiliki aset antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan omset antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar per tahun. Pendefinisian ini membantu dalam memahami skala dan karakteristik UMKM yang sangat beragam.

Disamping itu jika merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020, terkait kriteria UMKM terdapat pembaruan didalamnya. belum memberikan kriteria rinci terkait dengan jumlah kekayaan bersih dari usaha dan nilai hasil penjualan (Mingkid et al., 2023). Adapun ketentuan kriteria dalam UU Cipta kerja lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM). Dalam PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan seperti aturan terkait kriteria UMKM.

Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut UMKM dikategorikan berdasarkan modal usaha Kriteria modal

usaha digunakan untuk mendirikan atau mendaftarkan kegiatan UMKM yang dimulai setelah PP UMKM berlaku. Kriteria permodalannya adalah Usaha mikro dapat mempunyai modal usaha sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berada. Usaha kecil mempunyai modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan ruang kantor. Usaha menengah mempunyai modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berada.

Sedangkan untuk UMKM yang didirikan sebelum penerapan PP UMKM, kategori UMKM didasarkan pada hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan antara lain, usaha mikro mempunyai penjualan tahunan sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), usaha kecil memberikan hasil penjualan setiap tahun lebih besar dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), usaha menengah mempunyai pendapatan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Farisi et al.(2022) UMKM adalah bentuk lini usaha yang dioperasikan oleh rumah tangga, individu, maupun badan usaha skala kecil. UMKM memiliki peran signifikan dalam menciptakan peningkatan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena kemampuannya untuk bertahan dalam berbagai situasi guna mencapai kesejahteraan. Ketangguhan UMKM terbukti pada saat krisis moneter tahun 1998, di mana banyak perusahaan besar mengalami kejatuhan, namun UMKM tetap stabil dan mempertahankan operasionalnya saat krisis, bahkan mengalami peningkatan jumlah. Oleh karena itu, UMKM dapat dikategorikan sebagai usaha berskala kecil yang berkontribusi besar dalam menggerakkan pembangunan dan perekonomian Indonesia.

UMKM memiliki peran yang sangat penting baik di tingkat nasional maupun daerah. Di tingkat nasional, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyediakan sekitar 97% dari total lapangan kerja di sektor ekonomi, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UMKM seringkali menjadi sumber inovasi dan kreativitas, menghasilkan produk dan layanan baru yang unik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Di tingkat daerah, UMKM berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menggerakkan perekonomian daerah. Mereka juga membantu dalam pemerataan distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui diversifikasi ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada sektor-sektor tertentu(Novitasari, 2022).

### **UMKM Bidang Kuliner**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bidang kuliner adalah unit bisnis yang bergerak di sektor makanan dan minuman. UMKM kuliner mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari warung makan, kafe, restoran, catering, hingga penjualan makanan dan minuman secara online. UMKM kuliner memiliki peran penting dalam menyediakan beragam pilihan makanan dan minuman kepada masyarakat serta berkontribusi pada perekonomian lokal dan nasional.

UMKM bidang kuliner memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari sektor lainnya, antara lain:

1. Dominasi skala usaha  
Kebanyakan UMKM kuliner beroperasi dalam skala kecil dengan modal yang terbatas.
2. Keberagaman produk

UMKM kuliner menawarkan berbagai macam produk makanan dan minuman, sering kali dengan cita rasa lokal dan unik.

3. Fleksibilitas dan adaptabilitas

UMKM kuliner cenderung lebih fleksibel dalam menyesuaikan menu dan layanan mereka berdasarkan permintaan pasar.

4. Keterlibatan keluarga

Banyak UMKM kuliner adalah bisnis keluarga yang melibatkan anggota keluarga dalam operasional sehari-hari.

Adapun pada umumnya jenis-jenis UMKM pada bidang kuliner dapat dikategorikan berdasarkan jenis produk yang ditawarkan dan model bisnis yang dijalankan, antara lain:

1. Warung makan dan rumah makan

Unit usaha yang menyediakan makanan siap saji dengan menu yang bervariasi, sering kali dengan harga terjangkau.

2. Kafe dan restoran

Usaha yang menawarkan pengalaman makan yang lebih lengkap dengan menu makanan dan minuman yang lebih beragam serta suasana yang lebih nyaman.

3. Catering

Unit usaha ini menyediakan layanan penyediaan makanan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, pesta, dan pertemuan bisnis.

4. Street Food

Menjual makanan dan minuman di tempat-tempat umum seperti pasar, jalanan, dan pusat keramaian lainnya.

5. Penjualan online

Menjual makanan dan minuman melalui platform e-commerce dan media sosial, memungkinkan konsumen memesan secara online dan menerima pesanan di rumah.

### **Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan bahan yang krusial dalam pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), laporan keuangan termasuk pada bagian proses pelaporan keuangan yang kompleks, yang biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dirancang dengan tujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas, yang sangat bermanfaat bagi berbagai pihak, termasuk manajemen, investor, kreditur, dan pemerintah. Informasi ini membantu dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa depan dan dalam menilai rasio-rasio keuangan perusahaan.

Menurut Financial Accounting Standards Board (FASB), tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna untuk membuat keputusan investasi dan kredit. Informasi ini juga berguna bagi para pemakai yang tidak dapat meminta informasi secara langsung kepada entitas pelapor, sehingga laporan keuangan harus disusun secara lengkap dan transparan. Selain itu, FASB menekankan bahwa laporan keuangan harus dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja operasi, posisi keuangan, dan arus kas entitas untuk membantu pemakai laporan dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.

Menurut Syaharman(2021) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil refleksi atas berbagai transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi dan peristiwa keuangan didokumentasikan, disortir, dan diringkas dalam istilah moneter sebelum dievaluasi untuk berbagai tujuan. Perusahaan menyusun dan menyajikan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Agar

informasi keuangan bermanfaat, informasi tersebut harus relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan pengguna.

Penyusunan laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan dan kesuksesan sebuah bisnis, termasuk UMKM. Laporan keuangan menyediakan informasi yang akurat tentang kondisi keuangan perusahaan, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas (Andarsari & Dura, 2018). Informasi ini sangat penting untuk pengambilan keputusan manajemen sehari-hari, seperti pengelolaan kas, perencanaan anggaran, dan penilaian kinerja keuangan. Kedua, laporan keuangan yang disusun dengan baik memudahkan pemilik usaha untuk memonitor kesehatan finansial bisnis mereka, mengidentifikasi masalah sejak dini, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Selain itu, laporan keuangan juga merupakan alat komunikasi utama dengan pihak eksternal, seperti investor, kreditor, dan pihak pajak.

## **AKUNTANSI KEUANGAN**

Menurut Azwer (2022) dalam Wenur et al. (2023) Akuntansi adalah suatu seni dalam mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi keuangan. Proses ini melibatkan pencatatan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas bisnis secara sistematis dan terstruktur. Setelah dicatat, transaksi tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, seperti pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban. Langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini memuat berbagai informasi ekonomi yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian, akuntansi tidak hanya sekadar proses administratif, tetapi merupakan fondasi penting bagi pengelolaan dan pengambilan keputusan bisnis yang efektif dan efisien.

Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas. Tujuannya adalah untuk menyusun laporan keuangan yang memberikan informasi akurat dan relevan mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti manajemen, investor, kreditor, regulator, dan pihak eksternal lainnya.

Akuntansi adalah elemen penting dalam dunia bisnis yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Sistem pelaporan keuangan dalam sebuah usaha sering kali menjadi perhatian utama terkait kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan akuntansi dalam bisnis harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar akuntansi. Akuntansi bukan hanya sekadar alat pencatatan transaksi, tetapi juga fondasi yang krusial dalam operasional bisnis yang berkelanjutan. Dengan posisi strategisnya, akuntansi berkontribusi langsung terhadap efisiensi pengelolaan sumber daya dan transparansi keuangan yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sistem pelaporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi memungkinkan perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan yang jelas dan dapat diandalkan bagi para pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, regulator, dan pemilik usaha (Wardani & Wardana, 2022).

## **SAK EMKM**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan standar akuntansi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. SAK EMKM diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2018. Tujuan utama dari SAK EMKM adalah untuk menyediakan pedoman yang sederhana dan mudah diimplementasikan oleh entitas kecil agar mereka dapat menyusun laporan keuangan yang relevan dan andal, serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Menurut IAI, SAK EMKM dirancang untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang sering dihadapi oleh entitas kecil. Standar ini mengatur tentang penyajian laporan keuangan dasar yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya standar ini, diharapkan UMKM dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan dapat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pemilik usaha, kreditor, dan investor.

Menurut Mustarini & Fathah(2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa SAK EMKM merupakan standar yang dikhususkan untuk digunakan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah. SAK EMKM disusun untuk digunakan oleh entitas atau pelaku usaha yang belum mampu memenuhi persyaratan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK EMKM dirancang secara khusus untuk menjadi patokan akuntansi yang relevan dan praktis bagi UMKM. Standar ini menawarkan kemudahan penerapan dibandingkan dengan SAK ETAP, karena disusun dengan pendekatan yang lebih sederhana dan praktis. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dihasilkan melalui SAK EMKM tidak serumit dan sekompleks laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh UMKM yang mungkin memiliki keterbatasan dalam sumber daya dan keahlian akuntansi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji secara mendalam penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pekalongan. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau manusia dari perspektif partisipan yang terlibat. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data non-numerik (Kaharuddin, 2021). Jenis data dalam penelitian ini adalah data rimer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli atau responden pertama kali oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu (Abdussamad, 2021). Data yang dikumpulkan berupa informasi kualitatif yang mencakup pandangan, pemahaman, dan pengalaman responden terkait penerapan SAK EMKM dalam laporan keuangan mereka, serta sumber dokumen terkait keuangan UMKM. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data utama berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pelaku UMKM bidang kuliner dan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi langsung mengenai tingkat pemahaman dan kendala yang dihadapi dalam penerapan SAK EMKM. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa laporan keuangan UMKM, dokumen kebijakan, dan materi sosialisasi terkait SAK EMKM (Iryana & Kawasati, 2018).

Untuk menemukan informasi dan data dalam penelitian ini peneliti menyusun langkah-langkah yang rinci berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun prosedur pengumpulan data tersebut berupa:

1. **Persiapan Wawancara:** Peneliti menentukan pelaku UMKM yang akan menjadi responden dalam penelitian ini. Responden dipilih apabila mereka memiliki peran kunci dalam pengelolaan keuangan.
2. **Menyusun Panduan Wawancara:** Peneliti menentukan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman dan penerapan SAK EMKM.
3. **Pelaksanaan Wawancara:** Peneliti memulai wawancara dengan pendekatan yang ramah untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi responden, sehingga mereka merasa terbuka untuk berbagi informasi. Peneliti mendengarkan secara aktif, dan mencatat jawaban secara detail. Peneliti juga mengajukan pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden memberikan penjelasan yang mendalam. Peneliti menanyakan hal yang spesifik dan langsung meminta klarifikasi apabila terdapat informasi yang kurang jelas.



4. Pengumpulan Data Dokumentasi: Peneliti mengidentifikasi dokumen yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian, pengumpulan dokumen baik dengan memeriksa atau mendokumentasikan dokumen yang relevan, serta melakukan analisis dokumen untuk mengidentifikasi apakah laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan SAK EMKM atau masih terdapat kesenjangan.
5. Analisis dan Sintesis Data: Setelah wawancara selesai, peneliti melakukan transkripsi data dan mengidentifikasi hasil wawancara. selanjutnya peneliti membandingkan temuan wawancara dengan data yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki UMKM. Dari hasil wawancara dan dokumentasi dilakukan penggabungan untuk membangun gambaran yang komprehensif.
6. Pelaporan Hasil: Peneliti membuat laporan hasil wawancara dan analisis dokumen yang menyeluruh yang menggambarkan situasi aktual penerapan SAK EMKM di UMKM kuliner Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan temuan yang ada peneliti berusaha memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan penerapan SAK EMKM.

Adapun dalam penentuan jumlah informan dalam penelitian kualitatif memiliki pendekatan yang berbeda dalam penentuan sampel dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada representasi fenomena tertentu yang hendak dikaji daripada menggambarkan karakteristik populasi secara umum atau menarik generalisasi. Oleh karena itu, pemilihan informan kunci sangat penting dan didasarkan pada keterlibatan mereka terhadap situasi atau kondisi sosial yang dikaji dalam penelitian. Dalam Penelitian ini, informan kunci terdiri dari pelaku UMKM di sektor kuliner yang mencakup UMKM sektor mikro, kecil, dan menengah. Total informan adalah 12 yang mana setiap sektor ada keterwakilannya. Menurut Harahap(2020) dalam penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah sampel/ informan, semuanya tergantung pada kompleksitas dan keragaman fenomena yang diteliti. Dengan total informan 12 dianggap memadai untuk menggali informasi mendalam dan mencapai kejenuhan data. Menurut Uest, Bunce, dan Johnson (2006), kejenuhan data sering terjadi pada sekitar 12 peserta dalam kelompok yang homogen. Kejenuhan data adalah kondisi di mana pengumpulan data tambahan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan. Oleh karena itu, jumlah minimum 12 informan dianggap memadai untuk sebagian besar studi wawancara kualitatif. Adapun dalam penelitian ini peneliti menentukan responden sebagai berikut:

No	Nama Usaha	Kerja Usaha (Aktivitas Usaha)	Besaran Modal	Kriteria UMKM
1	UMKM kripik pisang	Pengolahan pisang menjadi kripik, pengemasan produk, distribusi ke pasar atau toko, dan pemasaran produk.	Rp 5.600.000	Usaha Mikro
2	UMKM Jus Buah	Pengadaan buah segar, pembuatan jus, penjualan jus secara langsung di gerai atau melalui pemesanan, dan pemasaran.	Rp 7.000.000	Usaha Mikro
3	UMKM Jajan Pasar	Pembuatan berbagai jenis jajanan tradisional, pengemasan, penjualan di pasar atau gerai, dan pemasaran.	Rp 5.000.000	Usaha Mikro

4	UMKM Mie Ayam	Pembuatan mie dan ayam, penyajian mie ayam untuk pelanggan, layanan makan di tempat atau bungkus, dan pemasaran.	Rp 7.500.000	Usaha Mikro
5	UMKM Kafe	Penyajian minuman kopi dan makanan ringan, pelayanan pelanggan di tempat, manajemen operasional kafe, dan pemasaran.	Rp 1.000.000.000	Usaha Kecil
6	UMKM Catering	Pengadaan bahan makanan, persiapan dan pembuatan makanan dalam jumlah besar, pengemasan dan pengiriman, serta pemasaran layanan catering.	Rp 1.000.000.000	Usaha Kecil
7	UMKM Resto	Penyajian berbagai hidangan, manajemen layanan makan di tempat, pengelolaan dapur, dan pemasaran resto.	Rp 1.500.000.000	Usaha Kecil
8	UMKM Rumah Makan	Penyediaan makanan dan minuman, pelayanan makan di tempat, manajemen operasional, dan pemasaran rumah makan.	Rp 1.003.400.000	Usaha Kecil
9	UMKM Familiy Resto Ikan Bakar dan Seafood	Pengadaan bahan baku ikan dan seafood, persiapan dan penyajian hidangan ikan bakar dan seafood, layanan makan di tempat, dan pemasaran.	Rp 1.500.000.000	Usaha Kecil
10	UMKM Fried Chicken	Pengolahan ayam menjadi fried chicken, penyajian produk kepada pelanggan, penjualan di gerai atau melalui layanan pesan antar, dan pemasaran.	Rp 5.120.000.000	Usaha Menengah
11	UMKM Mixue	Penyediaan minuman es serut dan es krim, pelayanan pelanggan, manajemen operasional gerai, dan pemasaran.	Rp 800.000.000	Usaha Mikro
12	UMKM Cafe and Resto	Penyediaan makanan dan minuman, layanan pelanggan untuk makan di tempat atau take-away,	Rp 2.000.000.000	Usaha Kecil

		manajemen operasional kafe dan resto, serta pemasaran.		
--	--	--	--	--

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini dipilih untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Proses analisis tematik melibatkan langkah-langkah seperti pengodean data, identifikasi tema utama, dan interpretasi hasil dalam konteks penelitian (Heriyanto, 2018). Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menghambat penerapan SAK EMKM serta strategi yang tepat untuk mengoptimalkannya pada UMKM di Kabupaten Pekalongan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan, dihasilkan data atas jawaban responden dan dokumen pendukung yang kemudian peneliti jadikan generalisasi pembahasan. Adapun generalisasi pembahasan dalam penelitian ini melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dianalisis secara holistik dan representatif. Pertama yaitu peneliti melakukan identifikasi pola umum dari jawaban responden. Kedua, peneliti melakukan penyaringan informasi untuk mengabaikan jawaban-jawaban yang bersifat sangat spesifik atau anomali, kecuali jika informasi tersebut memiliki relevansi khusus dalam konteks penelitian. Ketiga, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu membandingkan jawaban responden dengan keadaan di lapangan untuk memastikan validitas dan memperkuat generalisasi. Yang terakhir, dari generalisasi tersebut peneliti melakukan penyusunan pembahasan dan menghubungkannya ke tema-tema besar penelitian.

### **Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Bidang Kuliner di Kabupaten Pekalongan tentang SAK EMKM**

Pelaku UMKM yang berbeda-beda di Kabupaten Pekalongan mengetahui SAK EMKM dengan derajat yang berbeda-beda pula. Berdasarkan temuan wawancara, sebagian besar pelaku UMKM bidang kuliner masih kurang memahami secara menyeluruh gagasan dasar SAK EMKM. Terutama pada unit UMKM sektor kecil, Banyak pebisnis yang percaya bahwa membuat laporan keuangan menggunakan standar ini sulit dan memerlukan keahlian akuntansi yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SAK EMKM mempunyai niat untuk menyederhanakan pelaporan keuangan, masih terdapat hambatan besar: kesenjangan pengetahuan. Selain itu, kendala ketersediaan informasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman pelaku UMKM. Sejumlah peserta UMKM bidang kuliner mengungkapkan bahwa mereka belum pernah atau belum pernah melakukan sosialisasi atau pelatihan.

UMKM bidang kuliner yang tidak memahami SAK EMKM cenderung melakukan pencatatan keuangan secara tidak tepat dan tidak konsisten. Hal ini bisa mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan keuangan, seperti pencatatan yang tidak akurat, pengelompokan transaksi yang salah, dan ketidaklengkapan data keuangan. Ketidaktepatan ini dapat menyulitkan pemilik usaha dalam memantau kesehatan keuangan bisnis dan membuat keputusan yang tepat. Selain itu Tanpa pemahaman yang baik tentang SAK EMKM, UMKM mungkin tidak dapat menyusun laporan keuangan yang dapat diandalkan untuk analisis dan perencanaan. Akibatnya, pemilik usaha dapat membuat keputusan yang kurang tepat, seperti salah dalam mengalokasikan sumber daya, menetapkan harga produk, atau merencanakan strategi bisnis. Pengelolaan keuangan yang tidak efektif dapat menyebabkan masalah likuiditas, kesulitan dalam manajemen kas, dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi serta mengatasi masalah keuangan. UMKM bidang kuliner yang tidak

memahami SAK EMKM juga diindikasikan mengalami kesulitan dalam membuat anggaran, mengendalikan biaya, dan mengevaluasi kinerja finansial mereka secara menyeluruh.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Rimawati & Faisal(2021) mengungkapkan bahwa Pentingnya penyusunan laporan keuangan masih belum dipahami dengan baik oleh para pelaku UMKM, khususnya di daerah pedesaan terpencil dimana akses terhadap teknologi dan pengetahuan masih terbatas. SAK EMKM yang telah disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) seringkali tidak mereka ketahui sehingga menyulitkan mereka untuk menerapkannya. menyiapkan laporan keuangan yang memadai. Banyak UMKM di pedesaan terpaksa mengandalkan teknik manual yang padat karya dan rawan kesalahan karena mereka tidak memiliki akses terhadap pelatihan formal dan teknologi yang dapat menyederhanakan proses akuntansi. Kurangnya pemahaman tentang cara mengatur dan menyusun data keuangan, mencatat transaksi, dan menerapkannya.

Berdasarkan data yang diperoleh, pemahaman yang lebih mendalam terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) ditunjukkan oleh peserta UMKM ketika telah mengenyam pendidikan formal akuntansi atau pernah mengikuti pelatihan akuntansi. Mereka lebih mahir dalam membuat laporan keuangan yang mematuhi pedoman yang berlaku dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manfaat penerapan SAK EMKM untuk tujuan dan ekspansi perusahaannya. Sayangnya, masih sedikit sekali UMKM yang bergelar atau berlatar belakang akuntansi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan dan tingkat pendidikan pelaku UMKM secara umum, diperlukan upaya yang signifikan dan berkelanjutan. Kesadaran yang lebih besar akan pentingnya pelaporan keuangan yang tepat dan konsisten akan dipupuk dengan meningkatnya akses terhadap pendidikan akuntansi dan pelatihan langsung, yang akan meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan pencatatan. Sejalan dengan peneliian Adino (2019) dalam Sulistyawati(2020) bahwa tingkat pendidikan berdampak pada pemahaman UMKM dalam membuat laporan keuangan menggunakan SAK EMKM. Cara pelaku UMKM memandang pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi perluasan dan pengembangan usahanya mungkin dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Sekolah akuntansi formal sering kali menjadi sarana bagi seseorang untuk mempelajari akuntansi, khususnya tujuan laporan keuangan.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM dalam memahami SAK EMKM adalah keterbatasan sumber daya manusia. Banyak UMKM dijalankan oleh individu atau kelompok kecil yang sering kali kurang memiliki pengalaman atau pengetahuan akuntansi. Dalam situasi ini, pelaku UMKM biasanya lebih fokus pada operasional sehari-hari dan fungsi bisnis utama seperti layanan pelanggan, penjualan, dan produksi. Akibatnya, unsur-unsur penting seperti pelaporan dan pencatatan keuangan sering kali diabaikan atau dianggap kurang penting. Beban kerja meningkat secara signifikan ketika seluruh operasional perusahaan, termasuk urusan keuangan, harus dikelola oleh satu atau dua orang saja. UMKM sering kali harus menangani berbagai tugas administratif tambahan, seperti manajemen inventaris, penggajian, pemasaran, dan hubungan pelanggan. Kondisi ini membuat mereka kesulitan untuk memberikan perhatian yang memadai pada pengelolaan dan pencatatan keuangan sesuai dengan standar SAK EMKM. Kurangnya waktu dan pengetahuan akuntansi yang mendalam sering kali mengakibatkan pelaku UMKM mengabaikan pentingnya penerapan standar akuntansi yang benar, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas laporan keuangan mereka.

Kondisi ini diperparah oleh kurangnya akses ke pelatihan atau bimbingan profesional dalam akuntansi. Tanpa dukungan dari tenaga akuntansi yang kompeten, pelaku UMKM tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memahami dan menerapkan SAK EMKM secara efektif. Oleh karena itu, UMKM bidang kuliner umumnya menyadari

pentingnya pencatatan keuangan yang akurat, namun mereka sering menghadapi kesulitan dalam menerapkan standar akuntansi secara menyeluruh karena keterbatasan jumlah staf dan beban kerja yang berat. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan intervensi berupa pelatihan khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik UMKM. Pelatihan ini harus disesuaikan dengan konteks dan kapasitas UMKM, serta mencakup aspek praktis dari penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Selain itu, dukungan dari para profesional yang berpengalaman sangat penting untuk membantu pelaku UMKM memahami dan mengadopsi SAK EMKM secara efektif. Dari segi dukungan teknis, banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam menerapkan SAK EMKM, terutama karena kurangnya arahan dan dukungan praktis dari pihak terkait. Beberapa pelaku usaha mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap bimbingan yang tidak memadai dan kesulitan yang mereka hadapi saat menerapkan aturan akuntansi tanpa adanya bantuan langsung yang cukup. Dalam konteks ini, penyediaan panduan yang lebih jelas, dukungan langsung, dan akses ke layanan konsultasi dapat sangat membantu. Dengan langkah-langkah ini, pelaku UMKM dapat lebih mudah memahami dan menerapkan standar akuntansi yang relevan, meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan mereka, serta mengoptimalkan manajemen keuangan dalam usaha mereka (Sofyan & Kumala, 2021).

### **Faktor-faktor yang Menghambat Penerapan SAK EMKM oleh Pelaku UMKM Bidang Kuliner**

Terdapat beberapa tantangan besar dalam penerapan SAK EMKM oleh pelaku UMKM bidang kuliner di Kabupaten Pekalongan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM bidang kuliner terhadap standar akuntansi tersebut menjadi salah satu kendala utama penerapan SAK EMKM. Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan SAK EMKM dalam kegiatan operasionalnya mengalami kesulitan karena kurangnya pengetahuan yang luas mengenai hal tersebut. Informasi yang tidak lengkap ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan sosialisasi dari pihak terkait.

Keterbatasan sumber daya manusia merupakan faktor lain yang signifikan. Banyak UMKM bidang kuliner di Kabupaten Pekalongan dikelola oleh individu atau keluarga dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan yang memadai untuk memahami dan menerapkan SAK EMKM dengan benar. Selain itu, pelatihan dan pendidikan formal mengenai akuntansi seringkali tidak dapat diakses oleh pelaku UMKM karena alasan biaya dan waktu (Bakdiyanto & Ismunawan, 2022). Keterbatasan ini sering kali berdampak pada kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pelaku UMKM bidang kuliner. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai akuntansi, pelaku usaha mungkin tidak dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, yang dapat mengakibatkan ketidakakuratan dan ketidaklengkapan informasi keuangan. Masalah ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa pelatihan dan pendidikan formal mengenai akuntansi sering kali tidak dapat diakses oleh pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan. Faktor biaya yang tinggi dan keterbatasan waktu adalah kendala utama yang membuat mereka tidak dapat mengikuti kursus atau pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang akuntansi.

Selain keterbatasan pengetahuan dan sumber daya manusia, faktor finansial juga menjadi penghambat utama dalam penerapan SAK EMKM. Banyak UMKM yang beroperasi dengan modal yang sangat terbatas sehingga mereka lebih fokus pada kegiatan produksi dan penjualan untuk memastikan kelangsungan bisnis mereka. Investasi dalam pelatihan akuntansi atau pengadaan software akuntansi dianggap sebagai beban tambahan yang tidak dapat mereka tanggung. Akibatnya, mereka memilih untuk tetap menggunakan metode pencatatan keuangan yang sederhana dan tidak sesuai dengan standar (Yanto &

Zainurradi, 2022). Selain itu, kurangnya dukungan dari pihak eksternal, seperti pemerintah daerah dan asosiasi UMKM, juga menjadi faktor penghambat. Meskipun ada upaya sosialisasi dan pelatihan, pelaksanaannya seringkali tidak merata dan tidak menjangkau seluruh pelaku UMKM. Selain itu, program-program pendampingan yang ada seringkali tidak berkelanjutan sehingga tidak memberikan dampak jangka panjang. Pelaku UMKM membutuhkan dukungan yang konsisten dan berkelanjutan untuk membantu mereka menerapkan SAK EMKM dengan efektif (Cahyaningtias et al., 2022).

Faktor teknologi juga memainkan peran penting dalam hambatan penerapan SAK EMKM. Beberapa pelaku UMKM masih belum terbiasa menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan mereka. Mereka lebih nyaman dengan metode pencatatan manual yang sudah biasa mereka gunakan. Selain itu, ketersediaan perangkat teknologi dan akses internet yang masih terbatas di beberapa wilayah juga menjadi kendala dalam mengadopsi sistem akuntansi berbasis teknologi (Sofyan & Kumala, 2021).

### **Strategi yang Tepat untuk Mengoptimalkan Penerapan SAK EMKM di Kabupaten Pekalongan**

Untuk mengoptimalkan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) di Kabupaten Pekalongan, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai SAK EMKM kepada pelaku UMKM bidang kuliner. Pemerintah daerah, bersama dengan asosiasi UMKM dan lembaga pendidikan, dapat menyelenggarakan seminar, workshop, dan pelatihan secara berkala. Materi pelatihan harus disusun dengan bahasa yang sederhana dan praktis agar mudah dipahami oleh pelaku UMKM yang tidak memiliki latar belakang akuntansi (Sedyta et al., 2021). Sosialisasi dan edukasi yang efektif tentang SAK EMKM memastikan bahwa pelaku UMKM memiliki pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang diperlukan untuk menerapkan standar ini secara optimal. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan tetapi juga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka.

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor UMKM bidang kuliner. Program pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan harus diadakan untuk membekali pelaku UMKM dengan keterampilan akuntansi dasar yang diperlukan (Kodriyah et al., 2022). Pemerintah dan lembaga terkait bisa menyediakan modul pelatihan yang mencakup berbagai aspek SAK EMKM, mulai dari pengenalan dasar hingga penerapan praktis dalam menyusun laporan keuangan. Pelatihan ini juga sebaiknya dilengkapi dengan studi kasus dan contoh nyata yang relevan dengan kondisi usaha mikro dan kecil di Pekalongan. Dukungan teknis dan pendampingan langsung juga sangat penting untuk membantu UMKM dalam menerapkan SAK EMKM. Program pendampingan ini bisa melibatkan tenaga ahli atau konsultan akuntansi yang dapat memberikan bimbingan langsung di lapangan. Pendampingan tersebut sebaiknya mencakup seluruh tahapan penerapan SAK EMKM, mulai dari pencatatan transaksi harian hingga penyusunan laporan keuangan akhir. Dengan demikian, pelaku UMKM bidang kuliner dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan merasa lebih percaya diri dalam menerapkan standar akuntansi ini.

Penggunaan teknologi informasi dan sistem akuntansi berbasis komputer juga dapat menjadi solusi efektif dalam penerapan SAK EMKM. Pengembangan aplikasi akuntansi yang dirancang khusus untuk UMKM bidang kuliner dengan antarmuka yang user-friendly dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan mereka dapat sangat membantu. Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan pengembang teknologi untuk menyediakan perangkat lunak akuntansi yang mudah diakses dan terjangkau bagi UMKM. Selain itu, pelatihan mengenai penggunaan aplikasi ini juga perlu diselenggarakan agar pelaku UMKM dapat memanfaatkannya dengan optimal (Martha & Haryati, 2022). Sistem akuntansi berbasis

komputer memungkinkan otomatisasi berbagai proses akuntansi, seperti pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan rekonsiliasi akun. Automatisasi ini mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi laporan keuangan, sesuai dengan standar SAK EMKM. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem akuntansi berbasis komputer, pelaku UMKM bidang kuliner dapat mengatasi tantangan dalam penerapan SAK EMKM dengan lebih efisien dan akurat. Teknologi ini mendukung proses akuntansi yang lebih terstruktur, meningkatkan kepatuhan terhadap standar, dan mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan usaha UMKM bidang kuliner.

Penilaian dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan SAK EMKM di lapangan juga perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas strategi yang telah diterapkan. Pemerintah daerah dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SAK EMKM di UMKM bidang kuliner. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, proses penerapan SAK EMKM dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Utomo, 2019).

Terakhir, penting untuk membangun kesadaran akan manfaat jangka panjang dari penerapan SAK EMKM di kalangan pelaku UMKM. Sosialisasi dan edukasi harus menekankan bagaimana laporan keuangan yang baik dapat membantu UMKM dalam mengakses pembiayaan, merencanakan keuangan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik (Abubakar, 2024). Dengan memahami manfaat ini, pelaku UMKM akan lebih termotivasi untuk belajar dan menerapkan SAK EMKM secara konsisten. Kombinasi dari edukasi, dukungan teknis, insentif, dan evaluasi yang berkelanjutan diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan SAK EMKM di Kabupaten Pekalongan, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan dan keberlanjutan usaha UMKM di wilayah ini.